Halaman

Jonan Dipanggil ke Istana

Dari Halaman 1

2009-2014 tersebut mengaku tak tahu hal apa yang akan dibahas dengan Prabowo. Ia menyebut kehadirannya untuk memenuhi undangan yang disampaikan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

"Enggak tahu saya, enggak tahu. Diundang Pak Seskab itu," kata Jonan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (3/11).

Ia mengaku undangannya hanya untuk mengobrol saja. Ia pun enggan menyampaikan fokus obrolan.

"Enggak, enggak (ada materi yang disiapkan). Enggak tahu saya," ucapnya.

Sebelum Jonan, hadir lebih dulu Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK) Agus Harimurti Yudhoyono. Ia menyebut kedatangannya akan membahas sejumlah isu.

Salah satunya ialah isu polemik Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) alias Whoosh yang kini dilanda utang, termasuk membahas restrukturisasi utang Whoosh.

"Mau melaporkan tentunya sekaligus meminta arahan-arahan dari beliau, dari Bapak Presiden

di Istana.

Jonan menjabat menhub pada 2014-2016, di era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Pada 27 Juli 2016, posisi Jonan sebagai Menhub digantikan oleh Budi Karya Sumadi.

Saat menjabat menhub, Jonan cukup alot menggolkan proyek kereta cepat Whoosh. Salah satu persyaratan yang diminta Jonan kepada penggarap proyek Whoosh adalah masalah standar keselamatan penumpang.

"Keselamatan itu tidak bisa ditawar karena keselamatan itu harus single standard. Standarnya itu tunggal, jadi bukan soal harga, ini keselamatan," ujar Jonan di Istana Kepresidenan, Rabu (2/9/2015).

Jonan tidak peduli dengan nilai investasi atau harga proyek kereta cepat yang ditawarkan China dan Jepang. Menurutnya, selisih harga yang ditawarkan kedua kompetitor asing tersebut tidak mencerminkan tingkat jaminan keselamatan calon

"Apa kita berani soal keselamatan: oh ini lebih murah, tapi selamat tidak selamat dikit tidak apaapa, kan tidak. Ini saya sebagai menteri teknis ya. Yang bertugas mengurus transportation safety saya," tuturnya.

kan proyek kereta cepat. Masing-masing mengajukan proposal penawaran dengan spesifikasi dan harga proyek yang berbeda.

Jepang, yang sejak 2014 telah melakukan studi kelaikan, mengajukan penawaran nilai proyek sebesar US\$ 6,2 miliar. Jepang berjanji akan menciptakan kereta berkecepatan 320 km per jam dalam waktu lima tahun (2016-20121).

Sementara China, pada Maret 2015 tiba-tiba memasukan penawaran, dengan nilai proyek sebesar US\$ 5,5 miliar. Dengan harga proyek yang lebih murah dari Jepang, China bermimpi menghadirkan kereta berkecepatan 350 km per jam dalam jangka waktu hanya dua tahun (2016-2018).

Usai China keluar sebagai pemenang tender dan PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) terbentuk, Jonan mewajibkan 9 syarat perjanjian penyelenggaraan prasarana (konsesi) proyek kereta cepat agar proyek bisa jalan.

Salah satunya, pembiayaan proyek tidak boleh memakai dana APBN. Ada juga klausul soal pemerintah tidak memberikan jaminan terhadap kegagalan pembangunan maupun pengoperasian kereta cepat yang disebabkan oleh KCIC. Apabila KCIC tidak bisa memenuhi 9 persyaratan konsesi, proyek tersebut tidak bisa berjalan.(cnni/js)

tentang banyak. Termasuk kereta cepat," kata AHY Jepang dan China saat itu bersaing memperebut-

Gubernur Riau Terjaring OTT KPK

Dari Halaman 1

anto membenarkan Abdul Wahid termasuk di antara pihak yang ditangkap. "Salah satunya (Gubernur Riau ditangkap KPK)," katanya saat dikonfirmasi. Senin malam.

Sebelumnya, Fitroh menjelaskan OTT tersebut dilakukan terkait dugaan praktik korupsi di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Riau. "Benar (OTT pejabat Dinas PUPR Riau)," ujar Fitroh.

Meskipun demikian, KPK belum memerinci secara resmi identitas lengkap pihak-pihak yang diamankan maupun barang bukti yang ditemukan dalam operasi tersebut.

Sesuai dengan prosedur, KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang diamankan. "Status hukum mereka akan disampaikan ke publik melalui konferensi pers," ungkap Fitroh.

Hingga berita ini diturunkan, KPK masih melakukan pemeriksaan intensif di kantor lembaga antirasuah, Jakarta. Informasi lebih lanjut mengenai peran gubernur Riau dalam kasus ini akan diumumkan seusai pemeriksaan awal selesai.

Penangkapan Abdul Wahid menambah daftar panjang kepala daerah yang terseret operasi tangkap tangan KPK pada 2025. Lembaga antikorupsi menegaskan komitmennya untuk memberantas praktik suap dan gratifikasi di sektor pembangunan infrastruktur daerah.(bs/

Dasco Minta Pabrik Michelin Tahan PHK

Dari Halaman 1

Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa melakukan inspeksi dadakan (sidak) ke Pabrik Multistrada Arah Sarana (Michelin). Kehadiran Dasco dan Saan bersama dengan jajaran anggota Satgas Pelindungan PHK DPR RI.

Kehadiran jajaran DPR diterima langsung oleh HRD Perusahaan Michelin, Fajar. Dasco meminta

proses PHK karyawan di sana untuk dihentikan dulu. Usai berbincang dengan perwakilan perusahaan, pimpinan DPR menemui massa aksi di depan PT Michelin sekitar pukul 13.05 WIB. Dasco tampak

naik ke mobil komando yang disambut meriah oleh massa Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia

"Kami tadi sudah melakukan pembicaraan dengan manajemen PT Multistrada Indonesia, beberapa hal yang sudah disampaikan dan kemudian kita sepakati bersama. Yang pertama, proses-proses PHK untuk disetop dulu," ujar Dasco dengan

Ia menegaskan proses PHK harus mengikuti perjanjian kerja bersama dan ketentuan yang berlaku. Dasco meminta pekerja yang sudah dirumahkan untuk bekerja kembali.

"Yang kedua, apabila ada proses-proses PHK

harus mengacu pada perjanjian kerja bersama dan ketentuan tenaga kerja yang berlaku. Ketiga, kami minta kepada manajemen untuk yang saat ini teman-teman yang dirumahkan untuk segera bekerja kembali," kata Dasco.

Dasco juga meminta massa aksi untuk menjaga kondisi tetap aman. Ia ingin proses tersebut dijalankan dengan sebaik-baiknya.

"Dan selanjutnya apabila ada proses-proses selanjutnya agar pihak manajemen dapat melakukan perundingan sesuai dengan ketentuan dan saya juga minta kepada teman-teman menjaga kondusivitas, dan dapat bekerja kembali seperti biasa," imbuhnya.

KAU Desak Pemerintah Naikkan Upah 10 Persen

Dari Halaman 1

menaikkan UMP tahun 2026 sebesar 10 persen. Mereka menilai, kenaikan itu wajar, mengingat kondisi ekonomi dan kenaikan harga kebutuhan pokok yang terus terjadi.

Kata Johan Merdeka, tuntutan yang mereka sampaikan itu sangat penting untuk segera direalisasikan oleh pemerintah pusat maupun daerah. Karena kondisi ekonomi, dan kenaikan harga kebutuhan pokok yang terus terjadi.

Kemudian, KAU Sumut meminta Menteri Ketenagakerjaan agar mengakomodir Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan yang telah direkomendasikan oleh Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) nasional untuk diajukan kepada DPR RI.

Selanjutnya, ara buruh juga menuntut Gubsu Bobby Nasution, agar segera membentuk Satgas Perlindungan Upah. Tujuannya untuk memastikan tidak ada lagi perusahaan yang membayar upah di bawah ketentuan minimum

Selain itu, mereka juga menyerukan agar pemerintah menurunkan harga Sembako, dan melibatkan serikat pekerja/serikat buruh sebagai bagian dari Tim Pengendali Inflasi Daerah

KAU Sumut turut meminta Gubsu untuk membangun perumahan tipe 36 bagi buruh dengan cicilan Rp700.000 per bulan selama 15 tahun (tenor 15 tahun), sebagai bentuk kepedulian terhadap kesejahteraan pekerja

Tuntutan lainnya, yakni penambahan jumlah pengawas ketenagakerjaan di Sumut serta

peningkatan anggarannya. Agar pengawasan terhadap pelanggaran hak-hak pekerja bisa berjalan lebih efektif.

Mereka juga mendesak pemerintah daerah untuk menyelesaikan berbagai kasus ketenagakerjaan yang telah dilaporkan, namun belum mendapat tindak lanjut yang jelas.

Selain itu, massa menuntut Gubsu untuk menuntaskan kasus ketenagakerjaan di PT. Starindo Prima yang disebut belum terselesaikan selama 13 tahun. Kasus tersebut mencakup pelanggaran berupa kekurangan pembayaran upah tahun 2012-2013. Juga, tidak dibayarkannya upah lembur pada periode yang sama, serta pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak terhadap sembilan buruh yang hingga kini belum menerima hak pesangonnya sejak 2013.

Magang Bergaji UMK Kembali Dibuka 6 November

Dari Halaman 1

pakan Program Magang Nasional yang menjadi bagian dari paket stimulus ekonomi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

"Bulan depan dibuka kembali, ditingkatkan 80 ribu peserta magang. Seluruh peserta magang mendapat uang saku per bulan sama dengan uang saku daerah kabupaten dan kota," ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pada jumpa pers di Jakarta, Jumat (17/10).

Situs resmi maganghub.kemnaker.go.id menyebut perusahaan mulai bisa mendaftar 24 Oktober untuk bisa ikut serta menerima karyawan magang.

Kemudian, calon peserta magang bisa mulai mendaftar melalui situs tersebut 6 November. Proses seleksi hingga pengumuman peserta magang akan dilaksanakan pada 12-20 Novem-

Pelaksanaan magang bergaji UMK tahap kedua ini akan dilakukan 24 November 2025-23 Mei 2026.

Peserta Program Magang Nasional akan mendapatkan uang saku setara UMK lokasi masing-masing perusahaan. Uang saku diberikan setiap bulan selama enam bulan

Sebelumnya, pemerintah menggelar program magang bergaji UMK sebagai stimulus ekonomi. Syarat mengikuti magang ini adalah lulusan baru atau fresh graduate yang baru lulus satu tahun ke belakang.

Pada tahap pertama, lowongan magang dibuka untuk 20 ribu orang peserta.

Sebanyak 1.666 perusahaan ikut serta dengan menyediakan 26.181 lowongan magang. Ada 156.169 orang yang mendaftar sebagai peserta magang kala itu.

Para peserta magang telah mulai bekerja 20 Oktober 2025.(cnni/js)

Vietnam 'Tenggelam' Dihantam Banjir Bandang Kementerian Lingkungan Vietnam juga

Dari Halaman 1

men Bencana dan Tanggul Vietnam (VD-DMA), 35 korban tewas berasal dari provinsi Hue, Da Nang, Lam Dong, dan Quang Tri.

Di kota kuno Hoi An, air sungai meluap setinggi pinggang dengan ketinggian air tertinggi dalam 60 tahun terakhir. Kondisi itu membuat para warga panik.

"Semua orang kaget setelah banjir ini. Warga sudah siap-siap, tapi tidak menyangka air akan

naik setinggi ini," kata warga Hoi An, Chuong Nguyen, kepada AFP.

"Banyak warga tidak sempat berkemas sehingga banyak barang rusak. Semua orang merasa tak berdaya akibat kerusakan yang parah," tambah Chuong saat hujan masih turun.

Menurut laporan VDDMA dikutip dari AFP, bencana ini mengakibatkan lebih dari 16.500 rumah tenggelam akibat banjir.

Selain itu hewan ternak dan unggas terbawa arus, dan lebih dari 5.300 hektare lahan pertanian ikut terendam.

melaporkan lebih dari 100.000 rumah telah kebanjiran dan lebih dari 150 tanah longsor terjadi di berbagai wilayah. Bencana tersebut mengakibatkan total keru-

gian ekonomi mencapai lebih dari US\$610 juta (sekitar Rp 9,64 triliun), menurut data pemerintah Vietnam.

Selama sembilan bulan pertama tahun ini, bencana alam seperti badai, banjir, dan tanah longsor telah menewaskan atau menyebabkan hilangnya 187 orang di Vietnam. (cnni/js)

Pengamat: Ini Alasannya

Dari Halaman 1

internal.

"Mereka hanya menyampaikan laporan model Asal Bapak Senang (ABS) ke Gubernur," ujar

Selain itu, ia menyoroti kenaikan rasio kredit bermasalah (NPL Gross) pada September 2025 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Kondisi ini menunjukkan manajemen risiko

Muhri juga mengungkapkan, hak pegawai berupa Bankes tidak dibayarkan, sementara direksi justru tetap mengambil tentiem atau bonus

Bank Sumut melemah.

tahunan

"Pegawai dikorbankan, direksi berpesta bonus," sindirnya.

Tak berhenti di situ, ia menilai Unit Usaha Syariah (UUS) Bank Sumut kini hidup segan mati tak mau tanpa ada inovasi dan perhatian dari jajaran

Hal lainnya, Muhri menuding direksi tidak berani tampil menjelaskan persoalan publik secara terbuka khususnya kepada media.

"Mereka selalu lempar batu sembunyi tangan, bersembunyi di balik Gubernur Bobby Nasution ketika dikritik publik," pungkasnya.

Terakhir, berdasarkan temuan BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Nomor 97/ LHP/XVIII.MDN/12/2023 tentang LHP Kepatuhan Atas Pengelolaan Kredit Tahun Buku 20222

hingga Triwulan Ill 2023. Muhri Fauzi Hafiz menemukan banyak terjadi dugaan penyalahgunaan wewenang dan tanggung jawab pengurus (Dewan Direksi) yang tidak berjalan sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Temuan BPK itu jelas mengindikasikan adanya penyimpangan dan pelanggaran hukum berat, sehingga aparat penegak hukum juga harus berani memeriksa semua jajaran direksi," ungkapnya.

Untuk itu, Muhri berharap Gubernur Sumut Bobby Nasution selaku pemegang saham pengendali dapat segera melakukan evaluasi menyeluruh dan perombakan direksi demi mengembalikan kepercayaan publik terhadap Bank Sumut.(A-10)

Tiga Pembunuh

Dari Halaman 1

Kecamatan Sibolga Kota. Peristiwa yang menewaskan seorang mahasiswa bernama Arjuna Tamaraya (21) itu terjadi pada Jumat (31/10/2025) sekira pukul 03.30 WIB. Berkat kerja cepat tim gabungan Polres Sibolga, tiga pelaku berhasil diamankan dalam waktu kurang dari 1×24 jam setelah kejadian.

Kasus ini dilaporkan dengan nomor Laporan Polisi:
LP/A/8/X/2025/SPKT.SATRESKRIM/POLRES SIBOLGA/
POLDA SUMUT, pada tanggal 31 Oktober 2025.
Kapolres Sibolga AKBP Eddy Inganta, S.H., S.I.K., M.H.,

melalui Kasat Reskrim AKP Rustam E. Silaban, S.H., menyampaikan, pengungkapan ini merupakan hasil kerja cepat dan sinergi personel di lapangan yang langsung bergerak begitu laporan diterima.

"Begitu mendapat laporan dan hasil rekaman CCTV, tim langsung melakukan penyelidikan intensif. Kurang dari satu hari, dua pelaku utama berhasil kami amankan. Pelaku ketiga ditangkap keesokan harinya saat berusaha melarikan diri, jelas AKP Rustam.

Pelaku yang diamankan masing-masing berinisial ZP alias A (57), HB alias K (46), dan SS alias J (40). Ketiganya diduga terlibat langsung dalam penganiayaan yang menyebabkan korban meninggal dunia. Berdasarkan keterangan saksi dan hasil rekaman CCTV

Masjid Agung Sibolga, korban Arjuna Tamaraya semula berniat beristirahat di dalam masjid. Namun, salah satu pelaku menegur dan kemudian bersama rekannya melakukan kekerasan terhadap korban hingga korban mengalami luka

Korban sempat dilarikan ke RSUD Dr. F.L. Tobing Sibolga untuk mendapat perawatan, namun akhirnya meninggal dunia pada Sabtu (1/11/2025) pukul 05.55 WIB.

Dari hasil olah TKP, polisi menyita sejumlah barang bukti

Rekaman CCTV Masjid Agung Sibolga; Satu buah kelapa yang digunakan pelaku; Pakaian korban;

Topi hitam bertuliskan Brooklyn New York; dan Tas hitam merek Polo Glad. Selain penganiayaan, salah satu pelaku juga diduga

mengambil uang dari korban sehingga turut dijerat dengan Pasal 365 ayat (3) KUHP tentang pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian. Kapolres Sibolga menyampaikan, pihaknya masih terus mengembangkan penyidikan untuk memburu satu pelaku

lain yang belum tertangkap. Langkah lanjutan yang dilakukan mencakup pemeriksaan saksi, rekonstruksi kejadian, dan pelimpahan berkas perkara ke Jaksa Penuntut Umum (JPU). "Kami berkomitmen untuk menuntaskan kasus ini secara profesional dan transparan. Tidak ada toleransi terhadap

kekerasan, terlebih yang terjadi di lingkungan rumah ibadah," tegas AKP Rustam. Sementara, jenazah korban Arjuna Tamaraya telah dimakamkan di daerah domisili keluarganya usai dilakukan autopsi di RSUD Dr. F.L. Tobing Sibolga dengan persetujuan

keluarga.(A-10) Hidayah

Apakah Whoosh Merugikan Negara?

nelan dana sekitar Rp125 triliun naik dari estimasi awal sekitar Rp80 triliun. Pembengkakan biaya yang signifikan menimbulkan kekhawatiran publik akan efisiensi, transparansi, dan keberlanjutan pembiayaan infrastruktur strategis nasional.

Dari Halaman 1

Padahal, pada tahap awal, pemerintah menyatakan proyek ini tidak akan menggunakan dana APBN. Namun, kenyataannya, pemerintah akhirnya harus menggelontorkan penyertaan modal negara (PMN) untuk menutup sebagian pembiayaan dan menanggung risiko keuangan. Situasi ini membuat sebagian kalangan menilai proyek Whoosh berpotensi merugikan negara, terutama jika pendapatan operasionalnya tidak mampu menutupi biaya perawatan dan cicilan pinjaman luar negeri dari China Development Bank.

Namun, melihat persoalan ini hanya dari sisi beban fiskal tentu tidak cukup adil. Proyek besar seperti Whoosh juga perlu dilihat dari potensi manfaat jangka panjangnya. Jika dikelola secara profesional, Whoosh dapat menjadi katalis penggerak ekonomi baru di kawasan Jakarta-Bandung. Infrastruktur modern ini dapat mendorong tumbuhnya kawasan industri, pariwisata, dan hunian di daerah-daerah penyangga seperti Karawang, Purwakarta, dan Padalarang.

Selain itu, Whoosh menjadi simbol kemajuan teknologi transportasi Indonesia. Dalam konteks geopolitik dan ekonomi global, kehadiran kereta cepat menunjukkan kemampuan Indonesia beradaptasi dengan inovasi dan teknologi tinggi. Pembangunan semacam ini juga dapat meningkatkan daya tarik investasi asing yang membutuhkan efisiensi mobilitas antarwilayah. Artinya, manfaat Whoosh tidak hanya diukur dari neraca keuangan, tetapi juga dari efek sosial dan ekonomi yang lebih luas.

Namun demikian, potensi tersebut hanya bisa terwujud jika pemerintah serius memperbaiki tata kelola dan integrasi transportasi. Hingga kini, akses ke stasiun Whoosh belum sepenuhnya mudah dijangkau, terutama oleh masyarakat kelas menengah bawah. Harga tiket yang relatif mahal juga membatasi segmentasi pengguna. Akibatnya, tingkat keterisian kursi belum optimal. Padahal, efisiensi operasi menjadi kunci agar proyek ini tidak membebani keuangan negara.

Pemerintah perlu memperkuat konektivitas multimoda menghubungkan Whoosh dengan LRT, KRL, BRT, dan sistem transportasi publik lain agar mobilitas masyarakat lebih praktis. Tarif terintegrasi digital juga penting agar perjalanan tidak hanya cepat, tetapi efisien dan terjangkau. Transparansi keuangan dan audit independen harus dilakukan secara berkala untuk memastikan akuntabilitas penggunaan dana publik.

Lebih dari itu, proyek Whoosh seharusnya menjadi pelajaran penting bagi pembangunan nasional ke depan. Infrastruktur besar tidak boleh hanya dikejar demi kebanggaan politik, tetapi harus dirancang dengan kalkulasi ekonomi, sosial, dan lingkungan yang matang.

Pemerintah juga perlu memastikan bahwa manfaat pembangunan dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, bukan hanya kalangan terbatas.

Dengan demikian, menjawab pertanyaan "apakah Whoosh merugikan negara?" tidak bisa dijawab dengan hitam-putih. Proyek ini memang menimbulkan risiko fiskal, tetapi juga membuka peluang manfaat strategis yang besar. Kuncinya terletak pada tata kelola: jika dikelola transparan, efisien, dan inklusif, Whoosh dapat menjadi kebanggaan nasional yang membawa kemajuan; namun jika dibiarkan tanpa evaluasi serius, ia bisa berubah menjadi simbol kemegahan yang menambah beban keuangan negara.